

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Syafrial Aulia Hutasuhut

NPP. 28.0150

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Pemerintahan

syafrialhutasuhut@gmail.com

ABSTRACT

Citizen's political participation in exercising their right to vote is the most important indicator of the success of the Pilkada. However, the people of the Medan Timur District have low participation and have not reached the national target in the 2018 North Sumatra Governor Election. This study aims to analyze the political participation of the people of the East Medan District in the 2018 North Sumatra Governor Election. In this study, the method used was inductive qualitative. Data collection techniques by means of documentation and interviews were carried out to informants who came from election management institutions, the community and the apparatus of the East Medan District. Data analysis using techniques data reduction, display data and draw conclusions. The results of the study show that the factors that influence public participation in the 2018 North Sumatra gubernatorial election are: social status, the lower middle class are still apathetic about political participation and assume that the election of a regional head will not affect them. Economic status, jobs that force citizens not present in the implementation of the local elections. Parental political affiliation, direction given by parents greatly influence children's participation and choices, especially for first time voters, Organizational experience, If someone is involved in an organization, then he or she is involved in participating in various activities, especially state activities.

Keywords : Political Participation and Election of Regional Head

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih menjadi indikator terpenting dari keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Namun, masyarakat Kecamatan Medan Timur memiliki partisipasi yang belum mencapai target nasional pada Pilgub Sumut 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat Kecamatan Medan Timur pada Pilgub Sumut 2018. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara, informannya berasal dari lembaga penyelenggara Pemilu, masyarakat dan perangkat Kecamatan Medan Timur. Analisa data menggunakan teknik reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut 2018 yaitu: Status sosial, masyarakat yang menengah ke bawah masih apatis terhadap partisipasi politik dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka. Status ekonomi, pekerjaan yang

memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkada. Afiliasi politik orang tua, arahan yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap partisipasi dan pilihan anak terutama pada pemilihan pemula. Pengalaman berorganisasi, apabila seseorang terlibat dalam sebuah organisasi maka dia terlibat untuk berpartisipasi berbagai kegiatan, terlebih kegiatan kenegaraan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik dan Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu sistem politik atau cara berpolitik yang ditetapkan oleh bangsa kita Indonesia sebagai salah satu sarana untuk negara, pemerintah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memberikan aspirasi, pendapat, dan juga berpartisipasi langsung dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi pancasila dimana demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, dan kelembagaan yang demokratis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan pengertian pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surbakti (2010:185), juga menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Status sosial, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan
2. Status ekonomi, merupakan kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan
3. Afiliasi politik orang tua; dan
4. Pengalaman organisasi

Tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara menghadapi pesta demokrasi. Salah satu bentuk pesta demokrasi adalah dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada). Kegiatan rutinitas lima tahunan ini, seperti sebuah produk demokrasi yang menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang diperebutkan hak suaranya bagi para calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada. Masyarakat dimanjakan dengan berbagai perhatian dan janji politik yang dikemas dengan literasi politik demi meraih kemenangan.

Berikut penulis akan menyajikan data perbandingan partisipasi masyarakat Kota Medan pada pemilihan kepala daerah(Pilkada) walikota Medan tahun 2015 dan pemilihan kepala daerah(Pilkada) Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 Kecamatan Medan Timur memperoleh tingkat partisipasi sebesar 62,1%. Kecamatan Medan Timur telah mampu melampaui tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan yang sebesar 58,38% dan juga mampu melampaui tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Utara yaitu sebesar 61,77%.

1.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, tingkat partisipasi politik pemilihnya tergolong kecil karena belum mencapai target nasional. Hal ini merupakan sebuah keironian karena negara kita menganut sistem demokrasi namun masyarakatnya masih belum melek terhadap kontestasi politik yang dilakukan. Berdasarkan Data tingkat partisipasi masyarakat Medan timur hanya sebesar 62,1%. Hal ini memang sudah diatas rata-rata tingkat partisipasi pemilih baik tingkat provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan, namun tetap saja belum mencapai target nasional. Target nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) pusat yaitu sebesar 77,5%. Hal ini juga telah berlangsung cukup lama terutama bagi Kota Medan. Kota Medan belum pernah mencapai target nasional selama 3 kali melaksanakan Pemilihan kepala daerah.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Partisipasi Politik Masyarakat di tingkat Kecamatan. Penelitian Budi Ali Mukmin dan Muhammad Ridha Syafii Damanik yang berjudul *Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan* (Budi Ali Mukmin dan Muhammad Ridha Syafii Damanik, 2018), penelitian ini menemukan bahwa Untuk Kota Medan sudah menjadi rahasia umum apabila dalam setiap kontestasi politik, identitas etnis, agama dan isu putra daerah kerap dijadikan instrumen vote getter. Jika dilihat dari hubungan interaksi sosial antara etnis yang ada di Medan, pada dasarnya hubungan itu berjalan dengan normal. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa tingkat kecurigaan diantara masing-masing etnis itu sangat tinggi. Efek yang ditimbulkan dari kecurigaan itu dimana antara etnis tersebut saling mengandalkan ikatan primordial yang ada sebagai basis pergerakan politik jika berhadapan dengan kontestasi politik. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Faiz Albar Nasution dan Kushandajani dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018* (Faiz Albar Nasution dan Kushandajani, 2019), Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Hierarki partisipasi politik masyarakat Kec. Medan Maimun pada Pilgub Sumut 2018 lebih didominasi dalam partisipasi dalam pemberian suara dan apathi total. Faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kec. Medan Maimun pada Pilgub Sumut 2018 yaitu: (1) Kesadaran politik masyarakat Kec. Medan Maimun dalam Pilkada hanya sebatas pemahaman saja tanpa dibarengi menggunakan hak pilih, (2) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan calon sangat mempengaruhi perilaku masyarakat Kec. Medan Maimun untuk tidak menggunakan hak pilihnya, (3) Status sosial dan Status ekonomi menengah keatas dan menengah kebawah tidak menggunakan hak pilih dipengaruhi mayoritas pekerjaan dibidang barang dan jasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi pada Pilgub Sumut 2018 yaitu: (1) afiliasi politik orangtua memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, (2) Pengalaman Organisasi memiliki pemahaman dan perhatian terhadap politik lebih baik dan cenderung berusaha mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan juga oleh Falua Jisokhi Haluana’a, Irwan Nasution, dan Beby Masitho Batubara dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan* (Falua Jisokhi Haluana’a, Irwan Nasution, dan Beby Masitho Batubara, 2020) Penelitian ini

menjelaskan bahwa Masyarakat desa Orahili sebagian besar ikut memilih karena adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih disebabkan oleh citra kandidat serta isu/program yang menarik yang ditawarkan oleh setiap calon atau kandidat yang maju.

Berdasarkan penelitian dari beberapa peneliti tersebut, penelitian yang dilakukan penulis cenderung mirip dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Faiz Albar Nasution dan Kushandajani dengan penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Hal ini dilatarbelakangi oleh tahun penelitian yang sama dan juga lokus penelitian yang berada di dalam satu kota atau lokus penelitian relatif dekat dengan kondisi demografi penduduk yang juga hampir sama karena masih berada di dalam satu kota yang sama.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Surbakti (Surbakti dan Ramlan, 2010) yang menyatakan bahwa ada empat indikator dalam partisipasi politik yakni (1) Status Sosial; (2) Status Ekonomi; (3) Afiliasi Politik Orang Tua; (4) Pengalaman Berorganisasi.

1.5 Tujuan

Ada 3 (tiga) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang pertama mencari tau penyebab mengapa angka partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Timur belum mencapai target nasional, kedua adalah mencari tau apa saja faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Medan Timur, dan yang ketiga adalah terkait upaya yang dilakukan untuk menjawab hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu selanjutnya.

II METODE

Pada penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti yaitu Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Melihat permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif.

Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan elemen-elemen yang berhubungan dengan fokus yang diamati dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk memahami dan mencari berbagai keterangan dan fakta yang terjadi tentang masalah penelitian sehingga sasaran penelitian yang dilakukan akan lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Surbakti (2010:185), menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :

3.1 Status Sosial

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kecamatan Medan Timur, tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat ditentukan oleh status sosial seseorang. Baik status sosial pemilih maupun status sosial calon kepala Daerah. Status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan serta pekerjaan. Keturunan merupakan indikator yang dapat mencerminkan kedudukan status sosial seseorang dimasyarakat.

Pada kultur masyarakat Kota Medan yang Metropolitan, masyarakat dengan status sosial yang tinggi biasanya lebih cenderung ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Selanjutnya adalah pendidikan, hal ini merupakan indikator yang mampu mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas dan pekerjaannya. Tingkat pendidikan seseorang juga mampu menciptakan kemampuan seseorang untuk menghadapi kehidupan sosial maupun politik tanpa adanya rasa takut.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Medan Timur tergolong tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari ratusan sekolah yang berada di Kecamatan Medan Timur mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun hal ini belum berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang belum memenuhi target nasional.

Masyarakat Kecamatan Medan Timur terbagi menjadi 2 (dua) kelas sosial yakni masyarakat dengan kelas sosial menengah kebawah dan masyarakat dengan kelas sosial menengah keatas. Masyarakat dengan kelas sosial menengah kebawah dapat dikategorikan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka adalah masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan maupun yang pendidikannya hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Masyarakat tersebut umumnya menetap di pinggiran kota. Pada wilayah tersebut perkembangan dunia pendidikan dapat dikatakan masih minim dikarenakan lingkungan dan ekonomi yang tidak memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Pada kenyataan yang terjadi dilapangan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah menjadi sasaran dalam melakukan penyimpangan politik seperti politik uang. Hal tersebut bermula dari kurangnya pendirian dari pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka mudah untuk dipengaruhi. Masyarakat kurang memahami pentingnya memilih seorang kepala daerah berdasarkan kualitas agar mampu memimpin wilayahnya.

Selain masyarakat kelas menengah kebawah, terdapat juga masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik dan lebih tinggi. Pendidikan masyarakat tersebut minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, bahkan ada yang telah mencapai gelar Doktorat. Artinya masyarakat dari kelas menengah keatas dapat dikatakan lebih mengerti tentang politik baik itu mengenai hak maupun kewajibannya dalam berpolitik.

Masyarakat kelas menengah keatas memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi. Hal tersebut mengartikan demokrasi mampu hidup baik dimasyarakat dengan ditandai bahwa masyarakat dapat memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan kriteria dan hati nuraninya. Kesadaran

tersebut timbul tanpa adanya pengaruh dari orang lain dan politik uang yang gempar dilancarkan menjelang hari pemilihan.

Walaupun demikian masih marak dijumpai masyarakat dari kelas menengah keatas yang enggan untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noor Alfi Pane, AP yang berprofesi sebagai Sekertaris Camat menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjadi Golongan Putih pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kecamatan Medan Timur dikarenakan sudah jenuh dengan calon kepala Daerah yang mencalonkan diri. Beliau merasa calon kepala daerah kurang memenuhi kriteria masyarakat untuk dijadikan pemimpin.

Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk tidak hadir dalam tahapan pemungutan suara. Selain dari kurang memenuhinya kriteria, banyak juga masyarakat yang lebih memilih untuk liburan untuk melepaskan diri dari hiruk pikuk Kota Medan karena di hari tersebut merupakan hari libur.

Jenis pekerjaan masyarakat di Kecamatan Medan Timur yang heterogen merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya target angka partisipasi politik. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kecamatan Medan Timur adalah sebagai pedagang dan pegawai. Kesibukan bekerja sebagai pedagang yang mayoritas bekerja di pasar tradisional membuat masyarakat enggan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta para pegawai yang telah bekerja dari pagi hingga sore membuat banyak dari pegawai ini jenuh dan memanfaatkan hari libur tersebut untuk pergi berlibur ke luar daerah.

Selain dari sisi pemilih, Status Sosial calon Kepala Daerah juga dapat dijadikan Faktor Pendukung namun bisa juga menjadi Faktor Penghambat. Masyarakat milleneal sudah mampu membedakan dan mencari tahu bagaimana latar belakang calon kepala daerah tersebut. Pada tahun 2018 ini merupakan pentas politik yang sangat menarik, karena calon kepala daerah Sumatera Utara dua-duanya merupakan Tokoh Nasional.

Calon Gubernur yang pertama yaitu Edy Rahmayadi yang merupakan Purnawirawan TNI AD dengan jabatan terakhirnya adalah PANGKOSTRAD sekaligus juga merupakan Ketua Umum PSSI, wakilnya adalah Musa Rajekshah merupakan purta daerah Sumatera Utara. Keluarga dari calon wakil gubernur ini merupakan konglomerat terkenal di Sumatera Utara.

Sementara dari pasangan yang kedua yaitu Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan tokoh politik nasional, nama Djarot menjadi sangat terkenal karena dia juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan wakilnya yaitu Sihar Sitorus yang merupakan Politikus dan Pengusaha kondang dari Sumatera Utara.

Hal ini menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dengan harapan dapat membawa nama Sumatera Utara menjadi jauh lebih baik kedepannya.

3.2 Status Ekonomi

Status ekonomi merupakan faktor yang turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Pelapisan kedudukan seorang individu dimasyarakat dapat dilihat berdasarkan kepemilikan kekayaannya. Hal tersebut diketahui melalui pendapatan, pengeluaran, maupun kepemilikan atas benda berharga dan bernilai jual. Seseorang yang memiliki status ekonomi yang tinggi diharapkan mempunyai pengetahuan dalam bidang politik serta mempunyai minat dan perhatian pada proses politik yang berlangsung sehingga timbul kepercayaan terhadap politik didalam dirinya.

Status ekonomi calon kepala daerah juga memiliki peran dalam menentukan angka partisipasi masyarakat. Calon kepala daerah yang memiliki status ekonomi yang cukup baik akan mendapatkan penilaian yang lebih dibanding calon yang lain. Kepala daerah yang memiliki pendapatan dan kekayaan yang cukup tinggi membuat masyarakat memberikan kepercayaannya karena masyarakat beranggapan kepala daerah tersebut telah berkecukupan sehingga meminimalkan tindak pidana korupsi maupun pungutan liar yang marak terjadi dilingkungan pemerintahan daerah. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, maka timbul pula lah keinginan untuk memilih calon tersebut agar dapat mengubah nasib Provinsi Sumatera Utara ini karena sudah 2 kepala daerah sebelumnya masuk penjara karena Tindak Pidana Korupsi.

Status ekonomi begitu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Medan Timur bekerja pada sektor informal. Tercatat dari data yang telah diolah peneliti, bahwa warga Kecamatan Medan Timur yang bekerja pada sektor informal yakni sebagai pedagang, penyedia jasa, dan karyawan. Masyarakat yang bekerja pada sektor informal cenderung lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan harus pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih dikarenakan tingginya kebutuhan yang harus diutamakan dan dipenuhi.

3.3 Afiliasi Politik Orang Tua

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada pemilih pemula yakni adanya afiliasi politik dari orang tua. Korelasi antara pilihan orang tua dengan pilihan anak cukup signifikan. Pemilih pemula yang berusia remaja mengharapkan bimbingan dari orang tua yang dianggap sebagai tokoh panutan atau tokoh yang ideal. Lingkungan terdekat sangat memberikan pengaruh karena terdapat dorongan yang mempengaruhi pilihan anak yang tergantung oleh pilihan orang tua.

Pemilih pemula merupakan remaja yang belum memiliki pengalaman berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Remaja berusia 17 tahun telah memiliki hak untuk secara langsung memberikan suara dalam pemilihan umum. Pemilih pemula di Kecamatan Medan Timur hampir seluruhnya adalah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat serta ada juga yang telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.

Pemilih pemula memerlukan bimbingan orang tua dikarenakan pengaruh orang tua juga berdampak pada keinginan pemilih pemula untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Fakta dilapangan seperti yang diungkapkan oleh Saudari Sela, bahwa sebagian besar pemilih pemula kurang memikirkan tentang keadaan Provinsinya 5 tahun mendatang dengan pemimpin yang baru sehingga mereka mengikuti saja anjuran orang tua. Pemilih pemula akan menggunakan hak pilihnya jika orang tuanya mengajak pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kesadaran pemilih pemula masih rendah jika tanpa afiliasi dari orang tua.

Peran orang tua yang besar dalam membimbing pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik menandakan bahwa sosialisasi yang bersifat pendidikan politik bagi masyarakat umum perlu untuk dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi yang bersifat pendidikan politik diharapkan mampu meminimalisir praktek penyimpangan politik sehingga mampu menghasilkan pemilih yang cerdas dan berintegritas.

3.4 Pengalaman Berorganisasi

Faktor penunjang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni adanya masyarakat yang memiliki pengalaman berorganisasi. Organisasi yang dimaksud dapat berupa organisasi politik maupun organisasi sosial baik yang bersifat formal maupun informal. Masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam kegiatan berorganisasi memiliki tingkat kepedulian politik yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tidak pernah ikut berorganisasi.

Berorganisasi merupakan ajang untuk seorang individu mampu membuka wawasan, mencari pengalaman, bertukaran pikiran dan pendapat serta ajang untuk mencari pendukung. Kesadaran dan keaktifan seseorang dalam bidang politik akan lebih tinggi saat telah bergabung dengan organisasi dan menjadi penggerak dalam organisasi tersebut. Contoh pengalaman seseorang dalam berorganisasi tercermin dengan keikutsertaan dalam anggota Organisasi Masyarakat (Ormas), Himpunan Mahasiswa, maupun Karang Taruna.

Masyarakat yang memiliki pengalaman organisasi memiliki jejaring kenalan yang banyak dan menyebar. Kenalan yang banyak dan menyebar dapat memberikan keuntungan untuk memperoleh dukungan suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulong selaku salah satu tokoh masyarakat diketahui bahwa hampir seluruh kepala daerah yang terpilih adalah sosok yang dulunya aktif dalam kegiatan suatu organisasi. Seseorang yang telah aktif diorganisasi secara tidak langsung lebih dikenal oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang telah dikenalnya lebih besar sehingga mampu mendorong masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya tanpa adanya paksaan. Masyarakat akan lebih segan dengan seorang pemimpin yang bersedia untuk turun langsung kelapangan dan menyapa masyarakatnya dibanding pemimpin yang memiliki kemampuan tinggi namun terkesan angkuh.

Pengalaman seseorang dalam berorganisasi mampu mengasah dan menguji kemampuannya dalam memimpin, bekerjasama serta bernegosiasi. Kegiatan berorganisasi akan mempertemukan orang dengan berbagai jenis karakter yang berbeda. Seseorang yang tergabung dalam organisasi dituntut mampu mendewasakan diri dalam bersikap dan berperilaku. Kegiatan pengembangan diri melalui organisasi memacu seseorang untuk berpikiran secara kritis dan sistematis sebelum menentukan pilihan politiknya. Seseorang yang memiliki pengalaman organisasi akan lebih cermat dalam mempertimbangkan pilihannya demi masa depan daerahnya 5 tahun mendatang.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu hal yang penting bagi negara demokrasi. Berjalan atau tidaknya roda demokrasi salah satunya bisa dilihat melalui tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakatnya pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwasannya berdasarkan faktor geografi dan demografi penduduknya menyatakan bahwa indikator yang dikemukakan oleh surbakti yaitu berdasarkan status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi sangatlah cocok untuk mencari tau penyebab tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tiga penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain yang berbeda geografi dan demografi penduduknya, penulis menemukan kemiripan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis berpendapat bahwasannya hal itu tidak terlepas dari kondisi geografis dan demografi penduduknya yang mirip yaitu berada di wilayah perkotaan dalam hal ini kota yang diteliti juga sama yaitu Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan status sosial calon kepala daerah menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, status ekonomi pemilih tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih, karena yang status ekonominya tinggi memilih untuk berlibur keluar daerah dengan memanfaatkan hari libur pada saat pemilihan dan yang status ekonominya rendah cenderung memilih untuk mencari nafkah. Afiliasi Politik Orang Tua sangat berpengaruh terutama pada pemilih pemula serta pemilih yang berorganisasi cenderung tinggi tingkat partisipasi politiknya.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan serta analisis data yang telah dijabarkan dalam pembahasan penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwasannya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Timur yaitu sebesar 62,1% dan belum memenuhi target nasional yaitu sebesar 77,5%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih mementingkan pekerjaan dan belum sadar terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah terutama gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian jika dilihat dari sisi faktor yang mendukung dan menghambat Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan maka dapat dinyatakan bahwasannya faktor yang mendukung pemilih dalam berpartisipasi dalam pemilihan yaitu tingkat pendidikan pemilih yang cukup tinggi, status sosial dan ekonomi calon kepala daerah, afiliasi politik orang tua terhadap pemilih pemula serta pemilih tersebut tergabung dalam suatu organisasi. Jika dilihat dari faktor yang menghambat masyarakat untuk memilih yaitu rendahnya tingkat ekonomi serta pendidikan masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena masyarakat tersebut tidak ada perubahan dalam hidup mereka jika mereka memilih calon kepala daerah tersebut, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilihan kepala daerah.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama diajukan kepada Camat Kecamatan Medan Timur beserta jajarannya, KPU Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Budi Ali Mukmin dan Muhammad Ridha Syafii Damanik 2018. *Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan*. Jurnal Geografi Vol. 10. Medan : Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
- Faiz Albar Nasution dan Kushandajani. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Semarang: Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtias Diponegoro

Falua Jisokhi Haluana'a, Irwan Nasution, dan Beby Masitho Batubara. 2020. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi. Medan : Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Rahman H.I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian dan Pengembangan(Research and Development / R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana .

